

Alih fungsi lahan atau konversi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan. Hal inilah yang akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian antara lain faktor sosial, ekonomi, dan kebijaksanaan pembangunan. Faktor sosial ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang mendorong kebutuhan lahan yang semakin tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong konversi lahan dengan berbagai pola konversi dan pemanfaatan lahan yang dikonversi. Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan keamanan struktur sosial masyarakat (Dwipradnyana, 2014).

# ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN & SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

**Rivqa Musjhtahida Arsyad  
Andi Muhibuddin  
Syafri  
Muhammad Arief Nasution**



**Penerbit:  
Chakti Pustaka Indonesia**

# **ALIH FUNGSI**

## **LAHAN PERTANIAN & SOSIAL**

### **EKONOMI MASYARAKAT**

**Rivqa Musjhtahida Arsyad**

**Andi Muhibuddin**

**Syafri**

**Muhammad Arief Nasution**

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN &  
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

Copyright@penulis 2023

Penulis:

**Rivqa Musjhtahida Arsyad  
Andi Muhibuddin  
Syafri  
Muhammad Arief Nasution**

Editor:

**Aslam Jumain**

Tata Letak & Sampul:

**Mutmainnah**

vi + 84 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2023

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

**ISBN: 978-623-88503-7-2**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia  
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah  
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya  
Makassar - 90241

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Alih Fungsi Lahan Pertanian & Sosial Ekonomi Masyarakat”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, November 2022

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II   TATA GUNA LAHAN .....</b>	<b>9</b>
A. Definisi Alih Fungsi Lahan .....	9
B. Perubahan Guna Lahan.....	13
C. Kesesuaian Penggunaan Lahan.....	14
D. Jenis Lahan Pertanian .....	15
<b>BAB III   SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT .....</b>	<b>17</b>
A. Aspek Budaya Masyarakat .....	17
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern.....	20
C. Sumber Daya Manusia .....	22
D. Pengawasan/Pemantauan .....	23
E. Kebijakan Pemerintah .....	25
<b>BAB IV   PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN .....</b>	<b>31</b>
A. Profil Wilayah Kabupaten Enrekang .....	31
B. Pola Alih Fungsi Lahan.....	39
C. Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan.	41
D. Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	50
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Alih fungsi lahan atau konversi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan (Lisdiono, 2004). Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan. Hal inilah yang akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (Rohani Budi Prihatin, 2017).

Konversi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, contohnya perubahan lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun (Lestari, 2009). Konversi lahan pada dasarnya merupakan gejala normal yang disebabkan karena adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan, akan tetapi permasalahan mulai timbul ketika lahan yang dikonversi berasal dari lahan pertanian (Ita Rustati Ridwan 2016).

Penggunaan lahan dibedakan menjadi penggunaan lahan secara umum dan penggunaan secara terperinci. Penggunaan secara umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang rumput, hutan atau daerah rekreasi. Sedangkan penggunaan lahan secara terperinci adalah tipe penggunaan lahan yang diperincikan sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk suatu daerah dengan keadaan dan sosial ekonomi tertentu (Hardjowigeno, 2007).



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian antara lain faktor sosial, ekonomi, dan kebijaksanaan pembangunan. Faktor sosial ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang mendorong kebutuhan lahan yang semakin tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong konversi lahan dengan berbagai pola konversi dan pemanfaatan lahan yang dikonversi. Pola konversi lahan dapat dikategorikan konversi lahan menurut pelaku dan prosesnya. Sementara pemanfaatan lahan yang dikonversi meliputi pemanfaatan untuk aktivitas pertanian lain dan lahan untuk non pertanian (Hilda dan Rilus, 2013).

Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan keamanan struktur sosial masyarakat (Dwipradnyana, 2014).

Kecamatan Anggeraja adalah salah satu wilayah di Kabupaten Enrekang yang memiliki kasus alih fungsi yang tinggi, dengan luas wilayah Kecamatan Anggeraja 125,34 Km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Singki mengandung konsekuensi, dimana jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 1.483 dan 1.740 pada tahun 2021. Seperti yang terlihat dari data tersebut laju pertumbuhan penduduk di Desa Singki sangat pesat. Hal ini yang mengundang meningkatnya kebutuhan lahan tempat tinggal, namun di sisi lain

dihadapkan pada kenyataan, bahwa ruang yang terbatas, kareananya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah lahan pertanian. Hal inilah yang membuka peluang munculnya masalah alih fungsi lahan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Winoto (2005) menyebutkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi konversi lahan, antara lain faktor kependudukan faktor ekonomi, faktor sosial budaya, perilaku *myopic* (mencari keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang), serta lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang ada (Hilda dan Rilus 2013).

Kepadatan dan penambahan penduduk dari tahun ke tahun serta masalah ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab adanya tekanan terhadap kebutuhan lahan akan permukiman, sehingga terjadinya pengalihan fungsi dari lahan pertanian ke non pertanian yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Anggeraja terutama di Desa Singki yang bermukim di sekitar lahan pertanian memanfaatkan lahan pertanian tersebut menjadi lahan permukiman untuk t, hal ini menjadikan adanya indikasi Alih Fungsi Lahan dan terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat alih fungsi lahan seluas 287,70 Ha. Pada kasus penelitian ini berfokus di Desa Singki dengan luas wilayah 839,12 Ha dengan kasus alih fungsi lahan seluas 53,56Ha (6,38%).

Demikian dalam hal ini maka penting di lakukan penelitian dengan judul alih fungsi lahan Pertanian di Desa Singki dengan fokus studi pada aspek sosial ekonomi yang terdiri dari pendapatan masyarakat dan budaya masyarakat

kemudian dari sumber daya manusia (SDM) terdiri dari tingkat pendidikan masyarakat, penambahan penduduk, dan usia masyarakat yang sejalan dengan teori Lestari (2009) yang menyatakan bahwa proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi serta lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Dengan tujuan untuk mengetahui pola alih fungsi lahan, faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan dan bagaimana strategi pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Desa Singki Kecamatan Anggeraja.

Ada beberapa Penelitian yang berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Namun yang lebih spesifik mengenai studi Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan lokasi-lokasi yang berbeda yang mana menganalisis dampak konversi lahan pertanian terhadap nilai ekonomi produksi tanaman pangan.

Dengan demikian. Originalitas ide dan hasil penelitian terjamin, walaupun ada hal-hal tertentu yang mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian pada lokasi dan tinjauan aspek yang berbeda.

Keaslian penelitian yang diuraikan pada penelitian ini lebih di fokuskan pada penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan kajian alih fungsi lahan pertanian . Beberapa penelitian tersebut antara lain, yaitu:

1. Wisnu Sasongko, Ilham Akbar Safari, Dan Kartika Eka Sari, Konversi Lahan Pertanian Akibat Pertumbuhan Lahan Terbangun Di Kecamatan Kota Sumenep., 2017.

Penelitian tentang konversi lahan pertanian akibat pertumbuhan lahan terbangun di Kota Sumenep bertujuan untuk mengetahui karakteristik perubahan tutupan lahan, faktor-faktor yang menyebabkan konversi lahan pertanian, faktor-faktor yang menyebabkan petani menjual lahannya, serta dampak konversi lahan pertanian terhadap nilai ekonomi produksi tanaman pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis berupa analisis tutupan lahan, analisis perubahan tutupan lahan, analisis faktor dan analisis itas yang hilang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan luas lahan terbangun dan penurunan luas lahan tidak terbangun. Semakin tinggi pertumbuhan luas lahan terbangun, maka semakin menyusut luas lahan tidak terbangun yang tersedia. Dari data klasifikasi tutupan lahan terlihat bahwa lahan terbangun mengalami peningkatan luas sekitar 9,15 Ha setiap tahunnya dan sebaliknya lahan tidak terbangun mengalami penurunan luas sekitar 9,15 Ha setiap tahunnya. Dari hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan konversi lahan diperoleh enam variabel yang berpengaruh, yaitu lokasi lahan, saluran irigasi, himpitan ekonomi, penambahan penduduk, kebutuhan tempat tinggal. Sedangkan hasil dari analisis faktor-faktor yang menyebabkan petani menjual lahannya diperoleh enam variabel yang berpengaruh, yaitu luas lahan, pengaruh pihak swasta, generasi muda, tuntutan kebutuhan hidup, tanggungan keluarga, serta kebijakan

dan peraturan pemerintah. Untuk dampak konversi lahan terhadap nilai ekonomi produksi tanaman pangan diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014) diperkirakan telah terjadi perubahan guna lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan berdampak terhadap hilangnya penerimaan dari usaha tani padi sebesar Rp 799.839.797.

2. Hossimah Dan Subari., Percepatan Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 2017. Rencana Strategis Kabupaten Pamekasan tahun 2012 - 2032, kecamatan Galis direncanakan menjadi pemukiman perkotaan yang telah memiliki persentase lahan pertanian sebesar 50%. Jika terus terjadi pembangunan yang merelakan lahan pertanian sebagai sasarannya, dikhawatirkan lahan pertanian akan habis. Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan alih fungsi lahan dari tahun 2006-2016 dan menganalisis hubungan faktor ekonomi, faktor sosial dan peran pemerintah terhadap alih fungsi lahan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan tabulasi silang chi square. Hasilnya adalah selama tahun 2009-2015 terjadi perubahan fungsi lahan tegal menjadi pemukiman pada tahun 2011 sebesar 1,46 Ha untuk tempat tinggal, tempat usaha dan layanan umum. Faktor - faktor yang memiliki hubungan dengan alih fungsi lahan yaitu produktivitas lahan; peruntukan lahan, asal lahan, perubahan perilaku, hubungan lahan dengan pemilik; dan pengurusan izin.

Saran dari penelitian ini adalah memberikan arahan tentang pentingnya pertanian agar tetap eksis; Penegasan mengenai aturan tata guna lahan batas (land use); Mempersulit izin bagi mereka yang akan mengalih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

3. G.H.M. Kapantow, R.M. Kumaat, L. W. T. Sondak., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan. Secara khusus penelitian ini melihat pengaruh jumlah penduduk, PDRB per kapita, dan jumlah industri terhadap perkembangan luas lahan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Minahasa Selatan. Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan hanya PDRB per kapita yang berpengaruh secara nyata terhadap luas lahan pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana jika PDRB per kapita meningkat maka luas lahan pertanian akan menurun. Ini merupakan indikasi bahwa dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat maka kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian seperti perumahan, perkantoran, dan infrastruktur lainnya akan meningkat. Kebutuhan lahan tersebut cenderung dialihfungsikan dari lahan pertanian.



## **BAB II**

### **TATA GUNA LAHAN**

#### **A. Definisi Alih Fungsi Lahan**

Menurut (Dahuri Akhmad, 2011), mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi (Irawan, 2005).

Menurut Utomo (1992), mendefinisikan alih fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialih fungsikan. Dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang diberikan kepada pemilik lahan (Irawan, 2005).

Menurut Rhina dan Ani (2012), Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. Menurut Ilham N dkk.(2005), faktor penentu terjadinya alih fungsi lahan adalah faktor ekonomi, sosial, dan peraturan pertanahan. Alih fungsi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian yang cepat, dan kemiskinan (Willson, 2006).

Menurut Iqbal M (2007), Pemilik lahan akan mengalih fungsikan lahan ketika sektor yang lain memberikan keuntungan yang lebih banyak (Zinkhan, 1991). Persaingan



pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian menyebabkan alih fungsi lahan (Irawan, 2005).

Alih fungsi lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (Li dkk; 2010). Barlow (Alam S, 2007) menyatakan alih fungsi berdampak negatif terhadap lingkungan. Shen dkk(2010), menyatakan kebijakan pemerintah dalam mendukung pertanian mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Untuk mengurangi alih fungsi lahan pemerintah dapat memperketat peraturan hukum tentang tata ruang dan menjalankannya (Olson dan Lyson, 2001).

Menurut Kustiawan (1997), alih fungsi lahan atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Alih fungsi lahan umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan.

Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan,

serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia (Irawan, 2005).

Sumaryanto dan Tahlim (2005), mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada tiga, yaitu:

- a. Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,
- b. Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha

Kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha. Pola alih fungsi lahan ini terjadi di sembarang tempat, kecil-kecil, dan tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya baru signifikan untuk jangka waktu lama.

Alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata. Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara (Utomo, 1992).

Menurut Widjanarko (2006) dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain:

- a. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
- b. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran.

Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.

Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai Utara Pulau Jawa yang terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun, sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak memuaskan hasilnya.

Menurut Ruswandi (2007), secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa

konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Furi (2007), menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal). Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

## **B. Perubahan Guna Lahan**

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Martin, 1993). Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan, lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan. Menurut Bintarto

(1977) pola distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi (Trigus Eko, Sri Rahayu; 2012):

- 1) Pola memanjang mengikuti jalan.
- 2) Pola memanjang mengikuti sungai.
- 3) Pola radial.
- 4) Pola tersebar.
- 5) Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api.

Perubahan penggunaan lahan tidak terjadi di setiap lokasi karena lahan memiliki tingkat kestrategisan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga lahan yang memiliki tingkat kestrategisan yang tinggi akan berpeluang mengalami proses perubahan alih fungsi. Perubahan alih fungsi ini biasanya terjadi di kawasan tertentu yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda juga. (Yusri et al., 2019)

### **C. Kesesuaian Penggunaan Lahan**

Lahan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini (Andrianto, dkk; 2008). Beberapa literatur menggunakan istilah penyimpangan penggunaan lahan sebagai padanan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana penggunaan lahan. Restina (2009) dalam tesisnya, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi

penyimpangan yaitu kepadatan penduduk, luas lahan pertanian, bangunan di bantaran sungai dan jarak ke pusat kota. Faktor sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, mata pencaharian, kepemilikan lahan serta tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang yang rendah akibat kurangnya sosialisasi tentang RTRW juga mempengaruhi penyimpangan yang terjadi (Trigus Eko, Sri Rahayu;2012).

#### **D. Jenis Lahan Pertanian**

Setiap orang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan jenis-jenis lahan pertanian diantaranya dari pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sawah dan tegal (tegalan) atau ladang.<sup>25</sup> Sawah adalah lahan usahatani yang secara fisik permukaan berlumpur karena dialiri air hingga melebihi (50%), sawah biasa digunakan untuk tanaman pangan padi. Sawah pun juga digolongkan dalam beberapa kategori seperti sawah irigasi, sawah lebak, sawah pasang surut dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi adalah sawah yang aliran airnya telah mendapat air dari sumber mata air tertentu. Sawah lebak adalah sawah yang memanfaatkan sungai yang besar atau rawa di mana saat musim kemarau airnya menipis dan dapat digunakan untuk persawahan. Sawah pasang surut adalah persawahan yang bergantung pada sungai yang dipengaruhi air laut dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Sedangkan sawah tadah hujan adalah sawah yang hanya bergantung pada air di musim penghujan.

Tegalan/ladang yaitu lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman yang kering yang minim sumber air, dan tingkat pengusahaannya rendah dan kurang intensif. Termasuk dalam kategori tegalan kebun dan huma. Kebun merupakan lahan pertanian yang yang hanya ditanami tanaman tertentu yang umumnya bersifat monokultur. Seperti perkebunan sawit, kopi, dan macam jenis lainnya. Huma adalah lahan budidaya yang berasal dari lahan hutan dengan ciri pengelolaan yang minim sekali dan bergantung pada lapisan humus yang terbentuk pada sistem hutan yang bersangkutan.

# **BAB III**

## **SOSIAL EKONOMI**

### **MASYARAKAT**

#### **A. Aspek Budaya Masyarakat**

Budaya adalah sistem (dari pola-pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial) yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Dalam "cara-hidup-komuniti" ini termasuklah teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan organisasi politik, kepercayaan dan praktek keagamaan, dan seterusnya. Bila budaya dipandang secara luas sebagai sistem tingkah laku yang khas dari suatu penduduk, satu penyambung dan penyelaras kondisi-kondisi badaniah manusia, maka perbedaan pandangan mengenai budaya sebagai pola -pola dari (*pattern -of*) atau pola-pola untuk (*pattern -for*) adalah soal kedua. Konsep budaya turun jadi pola tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu menjadi "adat istiadat" (*customs*) atau "cara kehidupan" (*way of life*) manusia (Harris 41, hlm. 16).

Perlu mempertimbangkan keseluruhan budaya ketika menganalisa adaptasi. Secara dangkal mungkin dapat diterima bahwa perhatian dapat dibatasi pada aspek-aspek yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan tetapi apakah analisis dimulai dari praktek-praktek keagamaan, organisasi sosial, atau sektor lain dari satu kompleks budaya,



ini akan menampilkan hubungan-hubungan fungsional dengan kategori-kategori tingkah laku yang lain yang bersifat adaptif (Meggers hlm.43).

Kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku dalam cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu fenomena material: dia tidak berdiri atas benda-benda, manusia, tingkah laku atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan organisasi dari hal-hal tersebut. Budaya adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pikiran (*mind*) manusia, model-model yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan fenomena material di atas (hlm. 167).

Menurut Supartono 1992, terdapat 170 definisi kebudayaan. Catatan terakhir Rafael Raga Manan ada 300 buah, beberapa diantaranya (Roger M. Keesing 2013):

- 1) EB Taylor, *Primitive Culture*; 1871, Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adapt, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- 2) Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan

kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

- 3) Robert H Lowie, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal.
- 4) Keesing, kebudayaan adalah totalitas pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi dan yang ditransmisikan secara sosial.
- 5) Koentjaraningrat, Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya.
- 6) Rafael Raga Maran, Kebudayaan adalah cara khas manusia beradaptasi dengan lingkungannya, yakni cara manusia membangun alam guna memenuhi keinginan-keinginan serta tujuan hidupnya, yang dilihat sebagai proses humanisasi.

Budaya merupakan tindakan manusia dlama kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Berikut adalah definisi budaya menurut para ahli:

- 1) Lehman, Himstreet, dan Batty  
Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman

hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri.

2) Bovee dan Thill

Budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku.

3) Mofstede

Budaya diartikan sebagai pemrograman kolektifitas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dalam hal ini, bisadikatan juga bahwa budaya adalah pemrograman kolektif yang

## **B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern**

Meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet, dan Teori Harrod-Domar. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Masyarakat tradisional (*The traditional society*);
2. Prasyarat lepas landas (*The precondition for take-off*);
3. Lepas landas (*The take-off*);
4. Tahap kematangan (*The driven to maturity*);
5. Masyarakat berkonsumsi tinggi (*The age of high mass consumption*).

Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan

berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya. Harrod-Domar, mengatakan bahwa agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*):

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh;
2. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional;
3. Ratio modal produksi tetap;
4. Perekonomian terdiri dua sektor.

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (*Samuelson dan Nordhaus, 2002*). Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. *Pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relative (Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simatupang, 2008)*.

### C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) memiliki dua arti yang berbeda di antaranya adalah (Linov Hr, 2019):

1. SDM merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, Sumber Daya Manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang.
2. pengertian SDM yang kedua adalah dimana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut ahli lainnya, yaitu Hasibuan (2003, h 244), berpendapat Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. SDM meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang

dilakukan. Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab Daya Pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotional Quality (EQ)*, (Linov Hr, 2019).

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) selanjutnya adalah menurut *CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development)* dalam Mullins (2005), yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi (Linov Hr, 2019).

Ahli yang keempat adalah Mathis dan Jackson, mereka menjelaskan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi / perusahaan sesuai dengan keinginan (Linov Hr, 2019).

#### **D. Pengawasan/Pemantauan**

Muhadam Labolo (2007:264), mengatakan pengawasan adalah suatu kegiatan pengontrolan terhadap implementasi perencanaan kerja, perencanaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kenyataan saat ini, kegiatan fungsi pengawasan sering dijadikan alat bagi pelaku pengawasan untuk mengintervensi seseorang atau institusi

terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Harianto,2018) :

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Menurut Viktor Situmorang (2010), Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan.

3) Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor S, 2010). Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat

Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **E. Kebijakan Pemerintah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu:

##### **Pasal 77**

1. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Pemanfaatan ruang sesuai, maka di butuhkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penyesuaian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi alih fungsi lahan.

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

##### **Pasal 147**

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan



- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Rttairg.

Pasal ini di butuhkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada agar terwujudnya tata ruang yang sesuai

### **Pasal 135**

1. Penilaian pcmenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan'Ruang sdbagaimana dimaksud dalam Pasai. 149 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunalr/ pemohon tcrhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuai.an I(egiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-undangan.
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengar: tidak melalui prosedur yang benar, baLal demi hukum.
3. Kesesuaian Kegiatan Pennanfaatan Ruang sebagaimana dimiksud pada ayat (1) y4rrg tidak sesuai lagi ekibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi pbmerintah yalrg menerbitkan' Kesesuaian Kegiatan Penranf:ratan Ruang.
4. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksudl pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Agar arahan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan prosedur agar masyarakat juga dapat mematuhi dan mengikuti arahan sesuai prosedur agar pemanfaatan penggunaan lahan dapat memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan tidak terjadi lagi alih fungsi lahan

1. Teori Alih Fungsi Lahan

Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia.

2. Faktor yang mempengaruhi Konversi Lahan

Menurut Lestari (2009) proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor pVenting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

- Faktor Eksternal.

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

- Faktor Internal.

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

- Faktor Kebijakan.

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Sumaryanto dan Tahlim (2005), mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

- a. Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,
- b. Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha,

Kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha. Pola alih fungsi lahan ini terjadi di sembarang tempat, kecil-kecil, dan tersebar.

Furi (2007), menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama

mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).

### 3. Faktor Lingkungan

Sri Hayati, menyatakan: "Menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Soedjono menyatakan: Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya"

Dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan : "Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya"

Begitu juga Otto Soemarwoto, menyatakan : "Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya



# **BAB IV**

## **PENGENDALIAN ALIH**

### **FUNGSI LAHAN**

#### **A. Profil Wilayah Kabupaten Enrekang**

- 1) Aspek Fisik Dasar
  - a) Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara 3°14'36" - 3°50'0" Lintang Selatan dan 119°40'53" - 120°6'33" Bujur Timur. Kabupaten Enrekang secara geografis adalah Kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak ± 240 Km yang berupa wilayah pegunungan dataran tinggi, dengan luas wilayah 1.786,01 Km<sup>2</sup> (lebih kurang 2,86 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan). Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- ⊙ Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- ⊙ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- ⊙ Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- ⊙ Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis untuk pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi.

Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, 112 Desa dan 17 Kelurahan. Kecamatan terluas

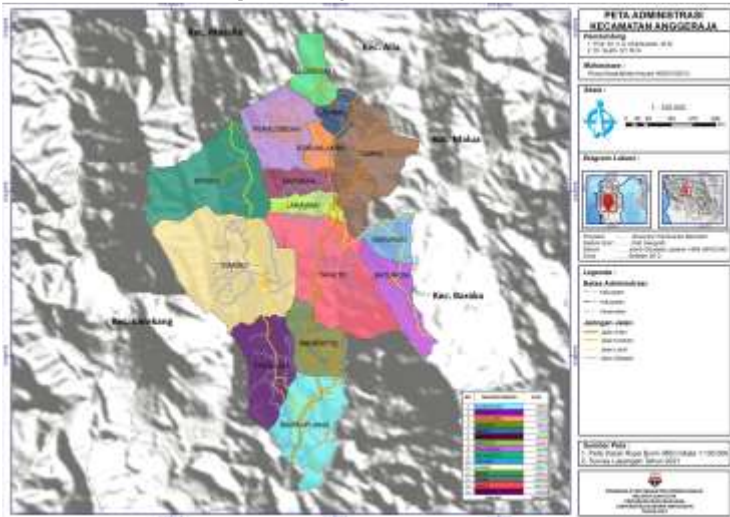
adalah Kecamatan Maiwa dan Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Alla, adapun yang lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kabupaten Enrekang**  
**Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan
1.	Maiwa	392,87	22
2.	Bungin	236,84	66
3.	Enrekang	291,19	18
4.	Cendana	91,01	7
5.	Baraka	159,15	15
6.	Buntu Batu	126,65	8
7.	Anggeraja	125,34	15
8.	Malua	40,36	8
9.	Alla	34,66	8
10.	Curio	178,51	11
11.	Masalle	68,35	6
12.	Baroko	41,08	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1 786,01</b>	<b>129</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Eenrekang tahun 2021*

Gambar 4.1  
Peta Administrasi Kabupaten Enrekang



## 2) Topografi dan Kelerengan

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukitbukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak



gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong dan lain-lain

Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur.

Topografi wilayah kabupaten Enrekang sebagian besar berada pada ketinggian  $> 1500$  m dpl. Pada ketinggian tersebut relatif banyak kendala untuk berbagai kegiatan pembangunan. Khususnya pada ketinggian  $> 2000$  m dpl tidak dapat dikembangkan untuk budidaya yang bersifat ekonomi, hal ini dikarenakan daerah dengan ketinggian tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebaran wilayah pada ketinggian tersebut berada pada bagian timur wilayah kabupaten Enrekang seperti Kecamatan Bungin dan Buntu Batu.

Sifat fisik tanah cukup menjadi kendala bagi pengembangan wilayah adalah kemiringan lahan pada wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh kemiringan lahan 25- $>40\%$ . Namun demikian areal lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal masih banyak dan merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan

khususnya untuk tanaman lahan kering baik tanaman perkebunan, buah-buahan atau tanaman keras lainnya.

### 3) Kondisi Geologi

Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya, maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9 (Sembilan) yaitu: Brown Forest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Cendana, Mediterian Coklat kekelabu-labuan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang, Mediterian Coklat banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla, Podsolik Coklat banyak terdapat di Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka, Podsolik Kekuningan banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Violet terdapat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.

### 4) Kondisi Hidrologi

Secara umum Kondisi Hidrologi yang ada di Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari.

Daerah Aliran Sungai yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah

perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan. Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient yang rendah sehingga terbentuk sungai-sungai yang berkelok-kelok.

5) Aspek Kependudukan

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kecamatan Anggeraja Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 28.468 jiwa yang terdiri atas 14.371 jiwa penduduk laki-laki dan 14.097 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 26.002 jiwa, penduduk Kecamatan Anggeraja mengalami pertumbuhan sebesar 9,48% . adapun rincian disajikan pada tabel :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut**  
**Kecamatan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2020**

No	Desa	Jumlah penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	perempuan		
1.	Tindallun	488	534	1.022	91,39
2.	Bamba Puang	1.232	1.250	2.482	98,56
3.	Tanete	1.827	1.630	3.278	101,10
4.	Lakawan	1.827	1.866	3.693	97,91
5.	Siambo	674	599	1.273	112,52
6.	Singki	855	818	1.673	104,52
7.	Mataran	1.480	1.418	2.898	104,37
8.	Pekalobean	1.212	1.128	2.340	107,45
9.	Bubun Lamba	747	760	1.507	98,29
10.	Salu Dewata	612	558	1.170	109,68
11.	Mampu	838	811	1.649	103,33
12.	Batu Noni	1.125	1.114	2.239	10,99
13.	Saruran	524	527	1.051	99,43
14.	Tampo	718	698	1.416	102,87
15.	mandatte	391	386	777	101,30
Anggeraja		<b>14.371</b>	<b>14.097</b>	<b>28.468</b>	<b>101,94</b>

Sumber : Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2021

## 6) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Anggeraja tahun 2020 mencapai 227,1 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 15 Desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Batu Noni dengan kepadatan sebesar 443,4 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Tindallun sebesar 83,9 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kelurahan Kecamatan Anggeraja**  
**Tahun 2020**

No	Desa	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Tindallun	3,59	83,9
2.	Bamba Puang	8,72	269,8
3.	Tanete	11,51	313,7
4.	Lakawan	12,97	397,1
5.	Siambo	4,47	195,5
6.	Singki	5,88	138,5
7.	Mataran	10,18	581,9
8.	Pekalobean	8,22	235,9
9.	Bubun Lamba	5,29	348
10.	Salu Dewata	4,11	89
11.	Mampu	5,79	155
12.	Batu Noni	7,86	443,4
13.	Saruran	3,69	256,3
14.	Tampo	4,97	190,1
15.	mandatte	2,73	129,5
Anggeraja		<b>100</b>	227,1

Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2021

- 7) Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang
- ⊙ Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Enrekang

## Pasal 28

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2, terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. Kawasan peruntukan peternakan.
2. Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 5.303,67 ha ;
  - b. Kawasan peruntukan tanaman pangan lahan kering seluas kurang lebih 10.633,86 ha;
3. Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3,022,45 ha.
4. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 45.221,85 ha.
5. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terutama di Kecamatan Maiwa dan sebagian di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua dan Kecamatan Masalle.

6. Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, seluas kurang lebih 4.969.71 ha.
7. Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian tercantum pada Lampiran II.7, II.8, dan II.9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B. Pola Alih Fungsi Lahan**

Hasil analisis superimpose yang menggunakan teknik overlay dibentuk melalui penggunaan secara tumpang tindih suatu peta yang mewakili masing-masing faktor penting lingkungan/lahan. Teknik overlay ini juga dapat melihat aktifitas kegiatan pemanfaatan lahan dimana terjadi perubahan fungsi ruang dalam suatu wilayah. Teknik overlay juga merupakan suatu informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki informasi/database yang spesifik) dari kumpulan peta individu ini atau biasa disebut peta komposit mampu memberikan informasi yang lebih luas dan bervariasi.

Adapun peta yang menggunakan teknik overlay adalah peta penggunaan lahan tahun 2011 dimana memberikan informasi sebelum terjadi tumpang tindih perubahan lahan 10 tahun kedepan dan peta penggunaan lahan tahun 2016 yang dimana dapat memberikan informasi tambahan terkait perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada kurun waktu 5 tahun, kemudian di lanjutka dengan menambahkan peta penggunaan lahan tahun 2021 yang

dapat menjabarkan hasil dari perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 2011-2016-2021. Bisa dilihat pada gambar berikut

**Tabel 4.4**  
**Perubahan Penggunaan Lahan 2011 - 2021**

NO	PENGGUNAAN	2011		2021		PERUBAHAN	
	LAHAN	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Hutan	304.67	18.81	296.37	18.30	8.30	0.5 1
2.	Hutan Rimba	578.80	35.73	578.80	35.73	0.00	0 0.0
3.	Padang Rumput	114.36	7.06	114.36	7.06	0.00	0 0.0
4.	Perkebunan/Kebun	220.67	13.62	165.34	10.21	55.33	2 3.4
5.	Permukiman	15.70	0.97	72.92	4.50	-57.22	- 3.5
6.	Semak Belukar	107.73	6.65	100.35	6.19	7.39	3 0.4
7.	Tegalan/Ladang	277.94	17.16	291.72	18.01	-13.78	6 - 0.8
<b>JUMLAH</b>		<b>1619.87</b>	<b>100</b>	<b>1619.87</b>	<b>100</b>		<b>5</b>

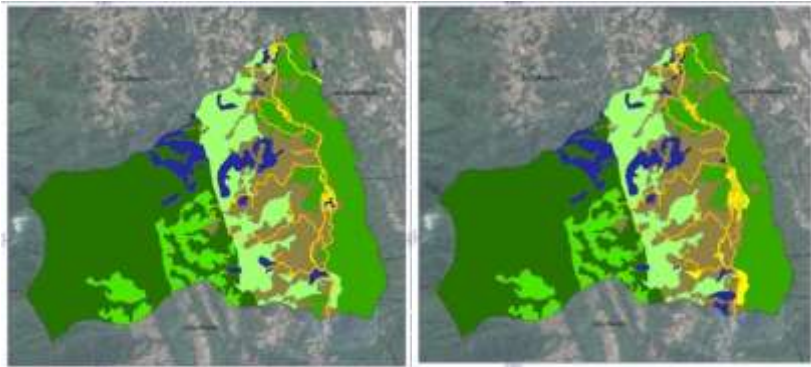
Sumber: Hasil Analisis Superimpose

**Tabel 4.5**  
**Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2011 Menjadi Kondisi Eksisting 2021**

NO	PENGGUNAAN LAHAN		PENGGUNAAN LAHAN	
	TAHUN 2011	LUAS (Ha)	TAHUN 2021	LUAS (Ha)
	1.	Hutan	304.67	Hutan
2.	Hutan Rimba	578.80	Permukiman	0.5
			Tegalan/Ladang	7.8
			Hutan Rimba	578.80
3.	Padang Rumput	114.36	Padang Rumput	114.36
4.	Perkebunan/Kebun	220.67	Perkebunan/Kebun	165.34
			Permukiman	53.56
			Tegalan/Ladang	1.77
5.	Permukiman	15.70	Permukiman	15.70
6.	Semak Belukar	107.73	Semak Belukar	100.35
			Permukiman	0.07
			Tegalan/Ladang	7.31
7.	Tegalan/Ladang	277.94	Tegalan/Ladang	274.85
			Permukiman	3.09
<b>JUMLAH</b>		<b>1619.87</b>		<b>1619.87</b>

Sumber: Hasil Analisis Superimpose

**Gambar 4.2**  
**Penggunaan Lahan Desa Singki Tahun 2011 dan 2021**



Berdasarkan hasil overlay yang dilakukan, penggunaan lahan tahun 2011 didominasi penggunaan lahan pertanian sebesar 53,56 Ha atau sekitar 3,42% dari luas wilayah Desa Singki. Selanjutnya berturut-turut penggunaan lahan: hutan 8,30 Ha (0,51%), Semak Belukar 7,39 Ha (0,46%), dan tegalan/lading 13,78 (0,85%).

### **C. Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan**

#### **a) Pengaruh Langsung**

##### **1. Substruktur I**

Uji t pada dasarnya menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu Alih Fungsi Lahan. Uji statistik pada model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah uji t yang merupakan pengujian secara individual (parsial). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai p lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$  mempunyai arti bahwa secara parsial dari variabel bebas (X) berpengaruh



terhadap variabel terikat (Y). Hasil Uji t dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji t**

	Estimate	P(> z )	Std. all	Keterangan
Y~				
Perubahan Penggunaan Lahan(Z)	0.271	0.002	0.268	Berpengaruh signifi
Pendapatan Masyarakat (X <sub>1</sub> )	0.150	0.002	0.254	Berpengaruh signifi
Sumber Daya Manusia(X <sub>2</sub> )	0.409	0.000	0.286	Berpengaruh signifi
Kelembagaan (X <sub>3</sub> )	0.149	0.062	0.151	Tidak Berpengaruh sigi
Budaya (X <sub>4</sub> )	-0.056	0.237	-0.093	Tidak Berpengaruh sigi

Sumber: Path Analysis

Berdasarkan hasil pengujian Tabel diatas terkait ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan, sebagai berikut:

### 1) Model

#### ➤ Perubahan Penggunaan Lahan(Z)

Diperoleh nilai p sebesar 0.002 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Perubahan Penggunaan Lahan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.268 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Perubahan penggunaan lahan dalam bekerja sebesar 1 % maka akan menaikkan Alih Fungsi Lahan pertanian sebesar 26.8%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat Perubahan penggunaan lahan maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

- Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ )  
Diperoleh nilai p sebesar 0.002 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Pendapatan Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.254 hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Masyarakat dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Alih Fungsi Lahan pertanian sebesar 25.4%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat menurunnya Pendapatan Masyarakat maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.
- Sumber Daya Manusia( $X_2$ )  
Diperoleh nilai p sebesar 0.000 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.286 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Alih Fungsi Lahan pertanian sebesar 28.6%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat Sumber Daya Manusia maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

- Kelembagaan ( $X_3$ )  
Diperoleh nilai p sebesar 0.062 yang lebih besar dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Kelembagaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian.
- Budaya ( $X_4$ )  
Diperoleh nilai p sebesar 0.237 yang lebih besar dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Budaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian.

## 2) Koefisien Determinasi

Nilai  $R_2^1$  (koefisien determinasi) sebesar 38.9%. Artinya 38.9% keragaman peningkatan Alih Fungsi Lahan pertanian mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ ), Sumber Daya Manusia( $X_2$ ), Kelembagaan ( $X_3$ ), Budaya ( $X_4$ ), dan Perubahan Penggunaan Lahan( $Z$ ), sisanya 61.1% dijelaskan oleh variabel lain.

### 1. Substruktur II

Uji t pada dasarnya menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu Perubahan Penggunaan Lahan. Uji statistik pada model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah uji t yang merupakan pengujian secara individual (parsial). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai p lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$  mempunyai arti bahwa

secara parsial dari variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Hasil Uji t dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji t**

Z~	Estimate	P(> z )	Std.all	Keterangan
Pendapatan Masyarakat (X <sub>1</sub> )	0.163	0.002	0.279	Berpengaruh ;
Sumber Daya Manusia(X <sub>2</sub> )	0.393	0.002	0.277	Berpengaruh ;
Kelembagaan (X <sub>3</sub> )	0.186	0.033	0.190	Berpengaruh ;
Budaya (X <sub>4</sub> )	-0.016	0.762	-0.027	Tidak Berpengar

Sumber: Path Analysis

Berdasarkan hasil pengujian Tabel diatas terkait ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan, sebagai berikut:

### 1) Model

#### ➤ Pendapatan Masyarakat (X<sub>1</sub>)

Diperoleh nilai p sebesar 0.002 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Pendapatan Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Perubahan Penggunaan Lahan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.279 hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Masyarakat dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Perubahan Penggunaan Lahan sebesar 27.9%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat menurunnya Pendapatan Masyarakat maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

#### ➤ Sumber Daya Manusia(X<sub>2</sub>)

Diperoleh nilai p sebesar 0.000 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Perubahan Penggunaan Lahan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.277 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Perubahan Penggunaan Lahan sebesar 27.7%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat Sumber Daya Manusia maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

➤ Kelembagaan ( $X_3$ )

Diperoleh nilai p sebesar 0.033 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa kelembagaan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Perubahan Penggunaan Lahan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.190 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Perubahan Penggunaan Lahan sebesar 19.0%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat Sumber Daya Manusia maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

➤ Budaya ( $X_4$ )

Diperoleh nilai p sebesar 0.762 yang lebih besar dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Budaya tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Perubahan Penggunaan Lahan.

## 2) Koefisien Determinasi

Nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 21.8%. Artinya 21.8% keragaman Perubahan Penggunaan Lahan mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ ), Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ), Kelembagaan ( $X_3$ ), dan Budaya ( $X_4$ ), sisanya 78.2% dijelaskan oleh variabel lain.

### b) Pengaruh Tidak Langsung

Uji t pada dasarnya menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu Alih Fungsi Lahan melalui Perubahan Penggunaan Lahan. Uji statistik pada model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah uji t yang merupakan pengujian secara individual (parsial). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai p lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$  mempunyai arti bahwa secara parsial dari variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) melalui mediator variabel Z. Hasil Uji t dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji t**

	Estimate	P(> z )	Std.all	β
Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)	0.044	0.030	0.075	Ber s
Sumber Daya Manusia( $X_2$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)	0.106	0.029	0.074	Ber s
Kelembagaan ( $X_3$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)	0.051	0.081	0.051	Tidak s
Budaya ( $X_4$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)	-0.004	0.763	-0.007	Tidak s

Sumber: Path Analysis

## 1) Model

- Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)  
Diperoleh nilai p sebesar 0.030 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Pendapatan Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan melalui Perubahan Penggunaan Lahan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.075 hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Masyarakat dalam bekerja sebesar 1% maka akan menaikkan Alih Fungsi Lahan sebesar 7.5%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat menurunnya pendapatan Masyarakat maka akan menghasilkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi
- Sumber Daya Manusia( $X_2$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)  
Diperoleh nilai p sebesar 0.029 yang lebih kecil dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Alih Fungsi Lahan melalui Perubahan Penggunaan Lahan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0.074 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusiadalam bekerja sebesar 1 % maka akan menaikkan Alih Fungsi Lahan sebesar 7.4%. Hal ini dapat diartikan bahwa Semakin besar tingkat Sumber Daya Manusiama akan menghasilkan

peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi.

- Kelembagaan ( $X_3$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)

Diperoleh nilai p sebesar 0.081 yang lebih besar dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Kelembagaan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap upaya peningkatan Alih Fungsi Lahan melalui Perubahan Penggunaan Lahan.

- Budaya ( $X_4$ ) melalui Perubahan Penggunaan Lahan(Z)

Diperoleh nilai p sebesar 0.763 yang lebih besar dari  $\alpha(0.05)$ , yang berarti bahwa Budaya tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap upaya peningkatan Alih Fungsi Lahan.

## 2) Koefisien Determinasi

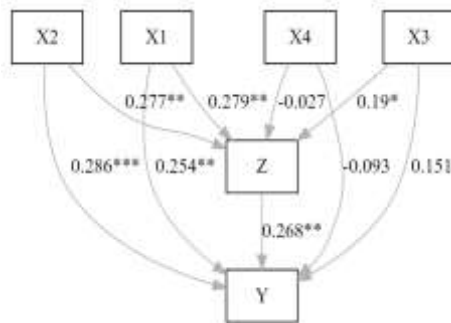
Besarnya nilai koefisien determinasi secara umum dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$M = 1 - (1 - R_2^1)(1 - R_2^2) = 0.522$$

Artinya 52.2% loyalitas masyarakat mampu dijelaskan oleh Pendapatan Masyarakat ( $X_1$ ), Sumber Daya Manusia( $X_2$ ), Kelembagaan ( $X_3$ ), dan Budaya ( $X_4$ ) secara langsung maupun tidak langsung, sisanya 47.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.



Gambar 4.3  
Model Path Analysis



#### D. Arahkan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Melalui strategi ini bagaimana cara untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Berikut adalah strategi arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di desa Singki Kabupaten Enrekang:

1. Mengendalikan Alih fungsi lahan yang terbukti menjadi permasalahan pada lahan pertanian di Kabupaten Enrekang untuk mengantisipasi tingkat kesejahteraan petani menurun.
2. Mensiasati Kurangnya ketersediaan hasil panen yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Meningkatkan penyuluhan sumber daya masyarakat untuk menghindari kurangnya lapangan kerja pertanian ke non pertanian yang menyebabkan pengangguran.

Adapun Berdasarkan pada PERMEN RTR/KBPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031

1. Pada kawasan lindung tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya, pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah kabupaten
2. Alih fungsi lahan pertanian dan tegalan menjadi lahan budidaya non pertanian dapat diizinkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten
3. Insentif dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana struktur dan pola ruang serta ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah mengenai RTRW
4. Pemberian insentif dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang dapat melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dapat berupa pemberian keringanan pajak, pemberian kompensasi, dan lain-lain
5. Pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan arahan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Dan dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Arahan pemberian sanksi dapat diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan umum peraturan zonasi, pemanfaatan ruang yang dilakukan tanpa izin yang diterbitkan berdasar RTRW Kabupaten. Serta pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar
7. Pengenaan sanksi dapat berupa:
  - Peringatan tertulis

- Pencabutan izin
- Pembatalan izin
- Pembongkaran bangunan
- Denda administratif

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pola perubahan penggunaan lahan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2021 yang dominan terjadi adalah perubahan kawasan Pertanian, hutan dan semak belukar menjadi kawasan terbangun. Perubahan kawasan pertanian menjadi areal permukiman dikarenakan kebutuhan untuk permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa akibat pertumbuhan penduduk serta kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, yang berujung kepada perambahan kawasan pertanian dan menjadikannya sebagai permukiman.

Variabel yang berpengaruh langsung terhadap Y yaitu pada substruktur 1 yang signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) adalah perubahan penggunaan lahan (Z), Pendapatan Masyarakat (X1), dan sumber daya manusia (X2). Adapun pada substruktur 2 yang signifikan terhadap Variabel independent (X) dan (Z) yaitu pendapatan masyarakat (X1), sumber daya manusia (X2) dan Kelembagaan (X3). Adapun Variabel yang berpengaruh tidak langsung yaitu melihat variabel independent (X) melalui variabel perubahan penggunaan lahan (Z) terhadap variabel alih fungsi lahan (Y) yaitu pendapatan masyarakat (X1) dan sumber daya manusia (X2).

Alih fungsi lahan yang terbukti menjadi permasalahan pada lahan pertanian di Kabupaten Enrekang untuk

mengantisipasi tingkat kesejateraan petani menurun serta Mensiasati Kurangnya ketersediaan hasil panen yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yaitu:

- a. Mengendalikan Alih fungsi lahan yang terbukti menjadi permasalahan pada lahan pertanian di Kabupaten Enrekang untuk meghindari tingkat kesejateraan petani menurun.
- b. Mensiasati Kurangnya ketersediaan hasil panen yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatkan penyuluhan sumber daya manusia untuk menghindari kurangnya lapangan kerja pertanian ke non pertanian yang menyebabkan pengangguran
- d. Memperketat ijin mendirikan bangunan dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran pada setiap alokasi ruang.
- e. Pada kawasan lindung tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya, pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah kabupaten
- f. Alih fungsi lahan pertanian dan tegalan menjadi lahan budidaya non pertanian dapat diizinkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten
- g. Insentif dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana struktur dan pola ruang serta ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peratuaran daerah mengenai RTRW

## DAFTAR PUSTAKA

- Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M., & Ruauw, E. . . (2018). Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.2.2018.20583>
- Barlowe, R. (1978). *Land Resource Economics*. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Dewi, N. K., & Rudiarto, I. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(2), 175–188.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Land use change and suitability for RDTR in peri-urban areas. Case Study: District Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(4), 330–340.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 330. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6487>
- Fadholi, H., Syamsiar, S., & Kismantoroadji, T. (2015). Dampak Konversi Lahan Pertanian Ke Nonpertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 16(2010), 15–26.
- Hardjowigeno, S., Subagyo, H., & Rayes, M. L. (2004). Morfologi dan klasifikasi tanah sawah. di dalam: Tanah

sawah dan teknologi pengelolaannya. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Bogor.*

Hossaimah, H., & Subari, S. (2017). Percepatan Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1(2), 97.

Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K., & Belajar, M. (2010). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*. 68–74.

Juhaidi. (2016). *Dampak alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman di desa kanjilo kecamatan barombong kabupaten gowa.*

Kabupaten, M. B., & Raya, K. (2019). *Cici Paramida, Emi Roslinda, Evy Wardenaar*. 7, 1524–1538.

Kapantow, G. H. M. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Cocos*, 6(3).

Kurniasari, M., & Ariastita, P. G. (2014). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), C119–C124. <http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7237>

Lestari, T. (2009). Dampak konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani. *Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor.*

Lisdiyono, E. (2004). *Penyimpangan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Majalah Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat.*

- Mustopa, Z., & Santosa, P. B. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*. Universitas Diponegoro.
- Nielsen, P. (2009). Coastal and estuarine processes. In *Coastal And Estuarine Processes* (pp. 1–360). <https://doi.org/10.1142/7114>
- Nurul Hidayati, H., & A. Kinseng, R. (2015). Konversi Lahan Pertanian Dan Sikap Petani Di Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 222–230. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9405>
- Pramudiana, I. D. (2018). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Asketik*, 1(2), 129–136. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i2.525>
- Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>
- Putri, Z. R. (2015). Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan NON PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH 2003-2013. *Eko Regional*, 10(10), 17–22.
- Ridwan, I. R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Lahan Pertanian. In *Jurnal Geografi Gea* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i2.2448>
- Rustiadi, E. (2001). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *Lokakarya Penyusunann Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan*, 10-11 Mei(November).



- Ruswandi, A., Rustiadi, E., & Mudikdjo, K. (2007). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus Di Daerah Bandung Utara Impact of Agricultural Land Conversion Toward Farmer ' S Welfare and Regional Development : Case. *Agro Ekonomi*, 25(2), 207–219.
- Sasongko, W., Safari, I., & Sari, K. (2017). Konversi Lahan Pertanian Akibat Pertumbuhan Lahan Terbangun Di Kecamatan Kota Sumenep. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 15–26. <https://doi.org/10.24252/planomadani.6.1.15-26>
- Subagiyo, A., Prayitno, G., & Kusriyanto, R. L. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kota Batu Indonesia. *Jurnal Kajian, Peneliiian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2), 135–150.
- Utomo, M. (1992). Alih fungsi lahan: Tinjauan analitis. Di dalam: Utomo M, Rifai E, Thahar A, editor. *Pembangunan Dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*.
- Utomo, M. (1992). Alih fungsi lahan: Tinjauan analitis. Di dalam: Utomo M, Rifai E, Thahar A, editor. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Bandarlampung (ID): Universitas Lampung. Hal, 3*.
- Winoto, J. (2005). Kebijakan Pengendalian alih fungsi tanah pertanian dan implementasinya. *Seminar Sehari Penanganan Konversi Lahan Dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi. Jakarta, 13*.